

NASIONALISME INDONESIA Dalam PUSARAN GLOBALISASI

Oleh: Pdt. Hans Lura¹⁾

¹⁾(Program Studi Teologi, UKI Toraja)

Abstrak

Turbulensi perjumpaan nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia dengan nilai-nilai globalisasi menjadi suatu keniscayaan. Suka atau tidak suka turbulensi itu akan selalu terjadi sebagai konsekuensi dari laju arus ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi digital. Derasnya system informasi digita itu menyingkap banyak fakta adanya kesenjangan yang bersifat struktural dalam masyarakat. Kesenjangan itu mencuat tidak saja dengan hadir dan diintrodusirnya nilai-nilai budaya Barat dalam pola pikir dan tingkah laku, tetapi juga sekaligus diperuncing oleh ketidaksiapan dan ketidakmatangan budaya domestik, untuk merangkul dan memberi inspirasi terhadap apa yang disebut kemajuan dalam kemodernan pusaran globalisasi. Di satu sisi nilai-nilai Barat yang hendak dikembangkan di Indonesia ternyata tidak mendapat dukungan yang kokoh dari struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Tetapi di sisi lain, banyak contoh dan kasus yang menunjukkan bahwa situasi ekonomi, sosial, politik ini tidak bisa disimpulkan sepenuhnya bersandar pada nilai asli domestik, kendati usaha-usaha ke arah itu dirasakan sangat gencar dalam praktik pembangunan. Karena itu, pertanyaan yang perlu dianalisis yaitu: Bagaimana membangun nasionalisme Indonesia dalam pusaran globalisasi?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun kapasitas identitas nasionalisme agar punya daya protektif untuk bersaing secara produktif ditengah derasnya arus globalisasi. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif *library research*. Metode ini menekankan kepada kemampuan mendeskripsikan fenomena yang ada, kemudian menganalisanya berdasarkan pandangan para ahli.

Hasil yang dicapai dalam penulisan artikel ini yaitu membina dan mempertahankan nasionalisme bangsa Indonesia, sebagai persyaratan utama untuk kesiapan dan dan kegigihan serta fleksibilitas dalam mengelaborasi bentuk-bentuk nasionalisme yang lebih relevan dengan tantangan zaman agar dapat survive dalam arus globalisasi.

Keyword: *nasionalisme, Indonesia, globalisasi, dan local wisdom*

I. Catatan Pendahuluan

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia diakhir dekade 90-an, puncaknya tahun 1997-2000 merupakan pengalaman pahit dalam krisis ekonomi, politik, dan hukum pasca kemerdekaan Indonesia. Kondisi negara dapat diibaratkan turbulensi (*chaos*) di mana banyak pengamat menyebutnya sebagai “*A Country in Despair*” suatu negara bangsa yang bukan sekedar diterpa bencana, tetapi telah tenggelam dalam ketiadaan harapan yang mendalam.²

¹ Hans Lura, Universitas Kristen Indonesia Toraja

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811 Tana Toraja, Indonesia. Email: hanslura25@gmail.com

² Daniel Dhakidae, *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), xvii

Indonesia sebagai negeri yang serba seolah-olah, *a heap of delusions*, tidak ada lagi sebenarnya apa yang disebut nasionalisme, heroisme, keadilan, persatuan, kejujuran maupun kebanggaan.

Pendeknya, lembaga-lembaga lama bertahan kendati tanpa wibawa. Indonesia membangun dengan fundamental ekonomi yang seolah-olah kuat, dengan politik yang seolah-olah stabil; dengan kesadaran seolah-olah bersatu; dengan pemerintah yang seolah-olah bersih dan kompeten; dengan ABRI yang seolah-olah satria; dengan ahli hukum seolah-olah adil; dengan pengusaha yang seolah-olah *captains of industri*;... Semua tampak salah, ibarat gigi palsu yang memang lebih kemilau daripada gigi asli,...mirip kebohongan di atas kebohongan.³

Rasa kebangsaan tersebut, telah mencapai titik nadir yang memilukan. Nasionalisme Indonesia yang bersumber dari Pancasila sedang mengalami degradasi dengan meningkatnya konflik: antar etnik, antar agama, sekte-sekte dalam agama, separatis dan fenomena disintegrasi bangsa lainnya. Konflik-konflik yang terjadi di Situbondo, Sampit, Sambas, Poso, Mesuji, Maluku, Papua, Aceh, dsb. Konflik-konflik tersebut melahirkan lagi masalah baru: pengungsi, korupsi bantuan kemanusiaan, masalah sosial, dsb. Pada dasarnya konflik tersebut berawal dari persoalan pribadi, akhirnya mengalami eskalasi konflik yang luas dan bersifat massal antar etnik, antar agama, antar kelompok, dsb. Pola konflik demikian disebut: Pola kepak sayap kupu-kupu.⁴ Sindhunata dalam tulisannya *Demitologisasi Persatuan Nasional* menyebutkan:

“... kelumpuhan terasa dalam ketidakberdayaan kita menghadapi fenomena perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kita khawatir, bila Aceh jadi merdeka, jangan-jangan kita juga tidak mampu mencegah Ambon, Riau, Papua, Poso, bila mereka ikut-ikutan ingin merdeka. Di manakah kiranya akar dari kerapuhan dan kelumpuhan itu?”⁵

Ketahanan integrasi bangsa kita di sini sedang diuji kehandalan karena kelalaiannya. Pemerintah Orde Lama, Orde Baru telah keliru dengan merasionalkan persatuan yang bersifat mitis itu menjadi suatu nasionalisme tanpa mewujudkan ke-mitis-an persatuan tersebut secara empiris. Maksudnya, pemerintah tidak memberi kesempatan bahwa masing-masing kelompok etnik untuk mengekspresikan keleluasaannya dalam persatuan bangsa ini. Ini sungguh mengerikan di mana orang tidak lagi menghargai bahwa perbedaan agama-budaya itu sebagai *Rachmatan lil-Allamin*. Bukankah negara ini juga dibangun atas dasar semboyan: *Bhineka Tunggal Ika*? Yang digali sejak jaman Majapahit dahulu dari Mpu Tantular dalam Negara Kertagama “*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*”.

³ Parakitri T. Simbolon, “Indonesia Memasuki Milenium Ketiga”, dalam *1000 Tahun Nusantara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2000), 2-6

⁴ Tweeki Triardianto dan Suwardiman, “Potret Konflik di Indonesia” dalam *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 322

⁵ Sindhunata, “Demitologisasi Persatuan Nasional” dalam *1000 Tahun Nusantara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2000), 93

Gerakan separatis, seperti kelompok GAM di Aceh, RMS di Ambon dan Gerakan Papua Merdeka. Semuanya ini jika dibiarkan akan mencabik-cabik kesatuan dan persatuan bangsa. Hal-hal yang semacam ini, menurut Francis Fukuyama dalam *The Great Disruption* si penulis buku terlaris abad ini *The End History of Last Man*, bahwa *Social Capital* kita menjadi rendah karena tidak adanya rasa saling percaya antar etnik, budaya, agama, justru yang ada adalah rasa curiga yang dalam. Ini berbahaya jika tidak ada rasa percaya-mempercayai, harga menghargai antar anak bangsa.

Sungguh menyedihkan, bangsa yang terkenal peramah, religius, dan menjunjung kesopanan, tiba-tiba berubah menjadi bangsa yang beringas, suka berkelahi dan saling membunuh. Nilai-nilai yang dahulu kita anggap agung, luhur, dan mulia, zaman sekarang ibarat binatang “langka” yang hampir musnah “mati suri” makin tidak berdaya. Penyair Latin Klasik Publius Ovidius yang telah menulis pada awal abad pertama Masehi: “*video meliora proboque, pejora autem sequor*” (saya melihat hal-hal yang baik dan menyetujuinya, tetapi ternyata saya mengikuti juga hal-hal yang kurang baik). Kemudian Filosof Nietzsche dengan caranya yang khas bahkan menulis bahwa “*der Irrtum hat aus Tirren Menschen gemacht*” atau “kekeliruanlah yang membuat hewan menjadi manusia, karena hewan tak bisa khilaf, sedangkan manusia sering keliru”.⁶

Ada semacam dugaan umum bahwa untuk menganalisis stagnasi kajian nilai-nilai Indonesia dewasa ini disebabkan adanya kesenjangan yang bersifat struktural dalam masyarakat sendiri. Kesenjangan itu mencuat tidak saja dengan hadir dan diintrodusirnya nilai-nilai budaya Barat dalam pola pikir dan tingkah laku, tetapi juga sekaligus diperuncing oleh ketidaksiapan dan ketidakmatangan budaya domestik, untuk merangkul dan memberi inspirasi terhadap apa yang disebut kemajuan dalam kemodernan pusaran globalisasi. Di satu sisi nilai-nilai Barat yang hendak dikembangkan di Indonesia ternyata tidak mendapat dukungan yang kokoh dari struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Tetapi di sisi lain, banyak contoh dan kasus yang menunjukkan bahwa situasi ekonomi, sosial, politik ini tidak bisa disimpulkan sepenuhnya bersandar pada nilai asli domestik, kendati usaha-usaha ke arah itu dirasakan sangat gencar dalam praktik pembangunan. Karena itu, pertanyaan yang perlu dianalisis yaitu: Bagaimana membangun nasionalisme Indonesia dalam pusaran globalisasi?

⁶ Ignas Kleden, *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 27

II. Perlunya Redefenisi dan Revitalisasi Nasionalisme Indonesia

Sebagai konsep sosial, nasionalisme tidak muncul dengan begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. Dalam studi semantik, kata '*nation*' berasal dari kata Latin '*natio*' yang berakar pada kata *nascor* 'saya lahir'. Selama Kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada abad Pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang).

Selanjutnya, kata *nation* mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Dari sinilah makna kata *nation* menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dengan banyaknya gerakan-gerakan kebangsaan di Eropa waktu itu menentang kerajaan-kerajaan besar seperti; Austria-Hongaria, Turki, dan Prancis, terpecah-pecah menjadi negara-negara merdeka yang lebih kecil. Kemudian timbul arti "*nasion*" yang merupakan inti dari paham nasionalisme,⁷ yang sering dikategorikan dalam nasionalisme terminologi klasik, melihat bahwa salah satu unsur esensial dari suatu bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas komunitas manusia yang saling merasa setia kawan satu sama lainnya.

"*Nasion* adalah suatu jiwa, suatu azas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan yang oleh manusia-manusia yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. *Nasion* mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas: yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama". Suatu *nasion* tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografis, atau hal-hal lain yang sejenis. Kehadiran suatu *nasion* adalah suatu kesepakatan bersama yang seolah-olah terjadi setiap hari antara manusia-manusia yang bersama-sama mewujudkan *nasion* yang bersangkutan."⁸

Otto Bauer mencoba berusaha mencari sejarah sebagai karakteristik bersama yang objektif dengan mengemukakan konsep *community of fate* (*Schicksalgemeinschaft*) yang

⁷ Ernest Renan, "*What Is A Nation?*" dalam *Nation and Narration*, Diedit oleh Homi Bhabha, (London: Routledge, 1990), 15

⁸ W.Harsja Bachtar, "*Integrasi Nasional Indonesia*" dalam Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro, *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2001), 33

mengikat para warga suatu bangsa ke dalam suatu *community of character* (*Charaktergemeinschaft*). Kemudian Bung Karno mencoba menambahkan konsep Geopolitik yang menyatakan bahwa bumi yang terdapat di antara ujung Sumatera sampai ke Irian itu adalah kesatuan bumi Indonesia, karena atas “ketentuan Allah SWT” didiami oleh berjuta-juta manusia yang mempunyai *le desire d’etre ensemble* dan *Charaktergemeinschaft (community of character)*. Bung Karno mengemukakan untuk “mendirikan suatu *Nationale Staat*, di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian”. Bung Karno, berkeyakinan bahwa bentuk ideal suatu negara bukanlah negara yang rakyatnya terdiri dari hanya satu kelompok etnis saja.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu, adalah *nationale staat*.

Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat*, yaitu zaman Sriwidjaja dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu tidak mengalami *nationale staat*. Saja berkata dengan penuh hormat kita punya radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrooesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan *nationale staat*. Dengan perasaan Hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjadjaran, saja berkata, bahwa keradjaannya bukan *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Ageng Tirtajasa, saja berkata bahwa keradjaannya di Banten, meskipun merdeka bukan *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk Keradjaan Bugis (Gowa), saja berkata, bahwa tanah Bugis (Gowa) yang merdeka itu bukan *nationale staat*.⁹

Nasionalisme, dalam perspektif sejarah menunjukkan perkembangannya sangat pesat. Jika abad sembilan belas sering disebut abad ‘Nasionalisme Eropa’, maka pada abad ke dua puluh nasionalisme telah menjadi a *universal idea-force* dalam kekuatan sejarah global kontemporer, bahkan sebagai abad *pan-nasionalisme*. Nasionalisme Indonesia-pun terlihat jelas menjadi suatu kekuatan besar sebagai proses yang dimotori oleh kemunculan kesadaran nasional yang dirumuskan oleh kaum inteligensia dan diperluas melalui partai politik pergerakan nasional hingga menjadi gerakan massa yang anti kolonial.¹⁰ Akan tetapi perjalanan nasionalisme itu tidak selalu menggembirakan dan belum berakhir. Terdapat kesan bahwa dalam perkembangan baru di berbagai bidang semakin gencar mendera nasionalisme. Menurut Guilbernau, permasalahan ganda yang dihadapi negara-negara berkembang khususnya:

In the Third world conflict will be unavoidable and will stem primarily from two main sources; the differences arising between the ethnic group included in the mostly

⁹ Soekarno, “Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 (Lahirnya Pantja-Sila)” dalam *Tujuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, (Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, 1961), 27-28

¹⁰ Teuku. I. Alfian, “Nasionalisme dalam Perspektif Sejarah” dalam *Jurnal Filsafat Pancasila No.2, Th. II* Desember 1998, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1998), 34

*arbitrarily created states received from the colonial period, and the wide gap between a small affluent elite and large numbers of people living in conditions of poverty.*¹¹

Nasionalisme pada tahap awal berhasil merekatkan penduduk yang heterogen menentang kolonialisme. Tetapi setelah proses dekolonisasi berlangsung terutama dalam *nation building*, perlu ada *revitalisasi* dan *redefinisi* nasionalisme yang makin kompleks tantangannya. Nasionalisme dapat memainkan dua peran pokok, yaitu: *Pertama*, sebagai ideologi yang mengatasi loyalitas dan solidaritas *parochial*. *Kedua*, sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman kekuatan eksternal baik kekuasaan kolonial, penetrasi *transnational corporation*, *multinational corporation*, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya pengaruh globalisasi.¹² Agar nasionalisme bangsa Indonesia bisa *survive* di tengah pusaran globalisasi, maka semangat nasionalisme yang bersumber dari Pancasila memerlukan elaborasi nasionalisme yang tidak hanya menekankan aspek ideologi-politik, tetapi juga meliputi kajian interdisipliner ilmu pengetahuan.

III. Nasionalisme dan Agama Tanpa Kekerasan

Konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada akhir dekade 90-an yang bernuansa SARA (suku, agama, ras dan golongan) menghentak dan mengguncang wajah nasionalisme bangsa Indonesia. Soliditas nasionalisme bangsa yang bersumber dari Pancasila dipertanyakan kekuatannya? Dalam perspektif agama pun kita bertanya: Mengapa agama-agama yang ada di Indonesia menampilkan wajah kekerasan? Bukankan semua agama di dunia ini mengajarkan cinta kasih, perdamaian dan melarang kekerasan?

Karena itu Pancasila harus mampu mengayomi secara adil semua agama yang ada di Indonesia, sehingga mampu menumbuhkan rasa kebangsaan. Kewarganegaraan atau nasionalisme sipil seperti yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau dalam *Du Contract Sociale*; begitu juga dalam nasionalisme budaya sebagaimana kesediaan *Dinasti Qing* untuk menggunakan adat istiadat *Tionghoa* yang membuktikan keutuhan *budaya Tionghoa*; begitupun pada nasionalisme ekonomi seperti yang mengikuti model Sumitro yang dikemukakan Mudrajat Kuncoro, serta nasionalisme etnik seperti yang ditulis oleh Johann Gottfried von Herder dengan memperkenalkan konsep *Volk* dan berkaitan dengan nasionalisme kenegaraan dimana penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu

¹¹ M. Guilbernau, *Nationalism, The Nation State and Nationalism in the Twentieth Century*, (Cambridge: Polity Press, 1996), 150

¹² Moeljarto Tjokrowinito, "Nasionalisme dalam Perspektif Politik" dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1998), 42

argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri contohnya nasionalisme *Fleming* di Belgia dan *Basque* di Spanyol serta *Kurdi* di Turki.

Agama tanpa kekerasan merupakan sumber energy bagi nasionalisme Indonesia. Buku: *Non-Violence in the World Religion* menyetengahkan secara ringkas bagaimana sejumlah tokoh dari berbagai belahan dunia dan dari berbagai agama dan kepercayaan telah memberi kesaksian dengan membaktikan hidup, terus bergulat dalam situasi konflik dan kekerasan serta berbagai teror yang sengaja diciptakan oleh berbagai pihak lain. Halina Birenbaum dan Marhin Buber sebagai contoh dari kelompok orang Yahudi yang pernah berpengalaman berhadapan dengan tragedi Holocaust jaman Hitler. Bahkan, kemudian Marhin Buber terkenal sebagai filsuf yang tampil dengan pemikiran *I-Thou* sebagai salah satu kerangka pemikiran bagaimana orang secara fundamental mengalami dinamika relasi. Dorothy Day dan Desmond Tutu mewakili golongan Kristen. Desmond Tutu yang hidup dan bertumbuh di bawah suasana *apartheid*, sebuah sistem politik pembedaan warna kulit, namun berhasil membawa masyarakatnya untuk menatasinya dengan salah satu prinsip "*No Future Without Forgiveness*". Dari golongan Islam, tampil tokoh seperti Mohamed Arkoun dan Fatima Mernissi. Arkoun yang terlahir di Algeria Afrika banyak mengalami kediktatoran, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan, justru mampu melakukan perjuangan tanpa kekerasan. Dari Hindu, tokoh Mahatma Gandhi merupakan tokoh legendaris dalam perjuangan *ahimsa*-nya yang tanpa kekerasan. Dari Budha, Dalai Lama, dan Aung San Suu Kyi. Maka perlu mendapat perhatian pula bagaimana Ester Purba dan Soraya Kamaruzzaman sebagai dua tokoh penerima *Yap Thian Hien Award* karena perjuangan gerakan alternatif mereka.

Berhadapan dengan realitas pluralis di Indonesia yang sangat rentan dengan konflik, maka semua agama di Indonesia diharapkan tampil dalam gerakan perdamaian tanpa kekerasan sebagai horizonnya. Ini juga mendukung cita-cita Pancasila mewujudkan civil society. Jika semua instrument sosial bangsa Indonesia melakukan gerakan perdamaian tanpa kekerasan, maka nasionalisme bangsa Indonesia akan tangguh.

IV. Nasionalisme dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sebagaimana telah disinggung, bahwa terminologi "*nasionalisme*" merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Konsep terwujudnya rasa kebangsaan di atas kedengarannya mudah dilakukan, namun dalam implementasinya tidaklah semudah itu. Persoalannya tidak cukup dengan

kesadaran perjuangan yang menuntut keberanian semata, melainkan telah menjadi suatu tuntutan perubahan atau pergeseran nilai-nilai sosial budaya itu adalah perlunya ditegakkan kejujuran (*truthfulness*) dan keadilan (*justice*). Bahkan kejujuran dan keadilan-pun tidak cukup jika tanpa disertai dengan transparansi atau keterbukaan, tiga komponen ini menjadi penting terutama untuk memperoleh “kepercayaan” sebagai modal sosial atau *social capital*.¹³

Modal sosial, secara sederhana bisa didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai dan ini memudahkan dalam bekerjasama. Begitu juga sebaliknya, jika di antara mereka ada dusta, maka sulit untuk bisa percaya dan sulit untuk bisa bekerjasama. Jadi kepercayaan, ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi masyarakat itu lebih efisien. Sekali lagi, norma-norma yang menghasilkan *social capital* harus secara substantif memasukkan nilai-nilai kejujuran, transparansi dan keadilan. Hal ini semua akan memudahkan untuk memiliki komitmen bersama seperti; rasa memiliki, rasa solidaritas yang tinggi, dan tolong-menolong.

Jika kepercayaan adalah ukuran yang signifikan dari *social capital*, maka ada tanda-tanda yang jelas bahwa *social capital* di Indonesia tengah mengalami penurunan atau kemerosotan. Banyak orang-orang Indonesia menyadari bahwa kepercayaan terhadap lembaga-lembaga dalam segala bentuknya, mulai dengan pemerintah Indonesia, DPR, hakim, jaksa, kepolisian, telah lama mengalami kemerosotan dan mencapai kerendahan historik selama terjadinya krisis multidimensi terjadi.

Adapun kemerosotan itu dapat kita lihat dalam sikap masyarakat yang lebih suka main hakim sendiri, jika mendapatkan maling maupun copet tertangkap basah. Tidak jarang terjadi dalam main hakim sendiri tersebut mereka bersama-sama mengarak keliling kampung menganiaya pelaku, membakar pelaku, dan amuk massa. Kepercayaan yang seharusnya diingat dan merupakan kebajikan moral, tapi dirusak, dihancurkan oleh sikap mementingkan diri sendiri atau egosif atau oportunisme dan aroganisme kekuasaan.¹⁴ Memang sulit untuk mengukur tingkat mementingkan diri sendiri maupun aroganismenya itu, tetapi yang pasti fenomena ini semakin meningkat dalam diri orang Indonesia masa kini. Oleh karena itu kini dibutuhkan rasa saling percaya, pemerintah atau aparaturnya yang bersih, jujur, dan terpercaya.

¹³ Francis Fukuyama, *The Great Disruption, Human Nature and Reconstitution of Social Order*, (London: Profile Book, 2000), 8

¹⁴ Ibid, x

Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran dari seorang filsuf politik terkemuka abad ke-20 Hannah Arendt dalam bukunya *The Human Condition* (1958). Ia menyatakan bahwa ada dua sifat utama dari tindakan manusia: *unpredictable* dan *irreversible*. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan manusia dalam ruang publik tidak bisa diramalkan dan tidak bisa diulang dari nol. Untuk menanggulangi yang *unpredictable*, manusia memerlukan janji. Janji tersebut harus keluar dari hati nurani kemanusiaan, di mana setelah berjanji harus dilanjutkan dengan upaya yang sungguh-sungguh ditepati. Sedangkan untuk menanggulangi yang *irreversible* adalah dengan pengampunan. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada seorangpun yang tidak pernah melakukan kesalahan. *No body perfect*. Artinya kita harus memberi kesempatan kepada mereka yang pernah melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya, bukan dengan menghina atau menghujatnya. Dalam hal ini, Hannah Arendt sendiri bersedia memaafkan Martin Heidegger yang menjadi salah seorang tokoh propaganda Nazi, setelah Heidegger menyatakan penyesalan atas tindakannya pada masa kekuasaan Hitler.

Satu hal lagi yang dapat kita terapkan di Indonesia dalam usaha memperkuat rasa nasionalisme yang kuat dalam persatuan bangsa, adalah perlunya menghilangkan pendekatan *dominant groups* bangsa Indonesia sebagai kesatuan yang lebih besar, maupun *foreign groups* dengan satuan-satuan atau kelompok-kelompok yang lebih kecil yang menjadi unsur pembentuk bangsa Indonesia itu. Kondisi obyektif di Indonesia yang menggambarkan paradoks itu sebenarnya tidak selalu menampilkan sisi positif ataupun negatif. Namun yang jelas ada faktor-faktor kondusif yang bisa bekerja dalam mencapai nasionalisme yang kokoh adalah yang diharapkan. Indonesia mempunyai modal dasar dalam nasionalisme dan integrasi bangsa yang kuat, yakni adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal itu dapat menjadi perekat integrasi bangsa. Tetapi bangsa Indonesia kini memasuki “masa kritis” (tahap 51-100 tahun) karena semakin hilangnya generasi pertama yang telah melakukan kesepakatan momentum historis tersebut. Generasi pasca 1945 (terutama kalangan intelektual/mahasiswa, maupun pemuda kelas menengah) lebih bersifat rasional, asertif, dan mereka tidak menerima “integrasi buta” atau “integrasi tanpa reserve”. Pemecahan masalah terpenting dalam integrasi bangsa tersebut, maka perlu diimbangi dengan unsur keadilan dan memerlukan “renegosiasi” antara pusat dan daerah dalam bidang politik-hukum, ekonomi, dan sosial-budaya. Pola *once and for all social contract* yang selama ini digunakan, tidak dapat dipertahankan lagi dengan ketergantungan ekonomi pada pemerintah pusat.

Pengembangan nasionalisme “dari bawah” oleh masyarakat (*popular nationalism*) perlu ditingkatkan, bukan nasionalisme “dari atas” oleh negara yang formal atau *official nationalism* yang dapat mengarah kepada *statism-militerism* yang justru akan berfungsi sebagai disintegrator. Nasionalisme dari bawah ini diperlukan dalam pengembangan paradigma integrasi bangsa yang dilandasi keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵ Sebab alasan-alasan yang sah, suatu daerah yang meminta memisahkan diri antara lain: terancam kebebasan dan keragamannya. Mengalami redistribusi yang diskriminatif dan inefisiensi, mempertahankan budaya; bela diri, dan pemaksaan integrasi masa lalu.¹⁶ Di situlah pentingnya aspek kebebasan, penghargaan dalam kebersamaan bangsa.

Pentingnya penghargaan dan rasa kebersamaan dan persatuan, sebab disintegrasi bangsa (*exit*) terjadi karena merasa tidak ada lagi rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa (*loyalty*). Namun protes daerah (*voice*) janganlah selalu dilihat sebagai tanda “tidak loyal”, melainkan sinyal bahwa nasionalisme dan integrasi bangsa yang berlangsung dianggap tidak adil. *Voice* yang ditanggapi dengan baik dapat mempertahankan integrasi bangsa, bahkan meningkatkan *loyalty*. Namun *voice* yang diabaikan dapat mengarah kepada *exit*.¹⁷

V. Nasionalisme dan Globalisme

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme. Sebaliknya, narasi-narasi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan transaksi sosial, politik, dan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat (khususnya pascatragedi WTC), Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Brasil, dan Indonesia.

Perkembangan nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya.

¹⁵ Iwan G. Sujatmiko, “Integrasi dan Disintegrasi Nasional” dalam *Harian Umum Kompas*, 20 Desember 1999, 3

¹⁶ A. Buchanan, *Secession: The Morality of Political Divorce from For Sumter to Lithuania and Quebec*, (New York: Basic Books, 1991), 115

¹⁷ Albert O. Hirschman, *Exit, Voice, and Loyalty*, Cambridge, (Mass: Harvard University Press, 1970), 337

Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber nyaris frustrasi ketika harus memberikan penjelasan sosiologis tentang fenomena nasionalisme. Dalam sebuah artikel pendek yang ditulis pada 1948, Weber menunjukkan sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang nasionalisme dapat dibangun. Tidak adanya rujukan mapan yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Apa pun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai budaya, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal. Mungkin dengan alasan yang sama, dua bapak ilmu sosial-Karl Marx dan Emile Durkheim-tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme.

Pesimisme Weber mungkin benar. Namun, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoretis. Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para ilmuwan mencoba memahami dan sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidak mudah mengingat, seperti yang dikatakan Weber, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme.

Andaikan nasionalisme sebuah gedung, setiap upaya mencari esensi nasionalisme berada di lantai yang berbeda-beda. Konsekuensinya, teorisasi nasionalisme sering bersifat partikular, tidak universal seperti yang diinginkan Weber. Namun, ini tidak menjadi masalah, khususnya dalam paradigma *postmodernisme* ketika pengetahuan tak lagi monolitik dan homogen. Beragamnya pandangan justru akan memperkaya pemahaman manusia akan fenomena di sekelilingnya.

Memang disadari bahwa dengan adanya globalisme, setidaknya membuat nasionalisme tidak semerbak ketika maraknya terbentuk negara-bangsa pasca Perang Dunia II. Hal ini bisa dipahami karena pola kehidupan manusia dalam pelbagai aspeknya teraduk seolah menjadi satu, tanpa terikat oleh batas-batas negara bangsa, peran dan efektivitas adanya negara bangsa mulai dipertanyakan. Sebab, beberapa negara-bangsa yang dicirikan oleh adanya teritorium, kontrol atas kekerasan, struktur kekuasaan, dan legitimasi, perlahan-lahan mulai kehilangan fungsinya. Tetapi ini semua tidak berarti habisnya riwayat nasionalisme, karena justru ditengah-tengah *universal-global* tersebut, banyak orang merindukan setelah adanya beberapa kecemasan para sejarawan maupun sosiolog mencermati

perkembangan sosio-budaya sekarang ini. Fenomena kehidupan yang berkembang sekarang ini sangat destruktif bagi agama dan kebudayaan dalam kaitannya dengan penekanannya pada hedonisme, pengejaran kesenangan di sini dan saat ini (*here and now*) penanaman gaya hidup ekspresif, pengembangan narsistik dan tipe kepribadian egoistik. Gerakan mengenai kapitalisme multinasional, Amerikanisasi, imperialisme media serta budaya konsumen, seolah-olah telah mengasumsikan bahwa perbedaan lokal-tradisional terhapus oleh beberapa kekuatan universal tersebut walaupun sesungguhnya hal itu mustahil.

VI. Catatan Conclusion

Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme sempit dan bukan pula suatu nasionalisme anakronistik: “*survival of barbarism*” maupun sebagai “[*the*] *spirit of archaism*” yang mendasari “*the nationalistic craze for distinctiveness and cultural self-sufficiency*”. Memang pada saat ini, banyak orang yang menganggap nasionalisme dan produk-produk turunannya seperti negara-bangsa (*nation-state*) dikatakan sudah kuno; namun banyak pula yang melihat bahwa nasionalisme dan produk turunannya itu masih relevan, bahkan sangat berguna untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan suatu bangsa. Adanya dikotomi yang ekstrem antara tugas-tugas fenomena historis *nasionalisme*, *modernisme*, bahkan *post-modernisme*, sebetulnya hanya akan menyesatkan, mengingat nasionalisme juga pada dasarnya merupakan visi masa depan (*nationalism is a vision of the future*).

Menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia tidak boleh menganut paham post-nasionalisme, bagaimana-pun kuatnya arus interdependensi yang terjadi. Untuk menghadapi dunia luar, Indonesia harus selalu membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan untuk membina dan mempertahankan nasionalisme bangsa Indonesia, persyaratan utama adalah kesiapan dan dan kegigihan serta fleksibilitas dalam mengelaborasi bentuk-bentuk nasionalisme yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Nasionalisme romantik, kewarganegaraan, kebudayaan, etnik, agama, maupun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan *accountable* dalam rangka mewujudkan *civil society* yang egalitarian.

Daftar Pustaka

- A. Buchanan, (1991), *Secession: The Morality of Political Divorce from For Sumter to Lithuania and Quebec*, (New York: Basic Books)
- Albert O. Hirschman, (1970), *Exit, Voice, and Loyalty*, (Cambridge, Mass: Harvard University Press)
- Alfian, Teuku. I., (1996), “*Nasionalisme dalam Perspektif Sejarah*” dalam *Jurnal Filsafat Pancasila No.2, Th. II* Desember 1998, (Yogyakarta: Gajah Mada Press)
- Bachtiar,W.Harsja., (2001), “*Integrasi Nasional Indonesia*” dalam Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro, *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies)
- Dhakidae, Daniel, (2002), *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)
- Fukuyama, Francis, (2000), *The Great Disruption, Human Nature and Reconstitution of Social Order*, (London: Profile Book)
- Guilbernu, M. (1996), *Nationalism, The Nation State and Nationalism in the Twentieth Century*, (Cambridge: Polity Press)
- Iwan G. Sujatmiko, (1999), “*Integrasi dan Disintegrasi Nasional*” dalam *Harian Umum Kompas*, 20 Desember 1999.
- Kleden, Ignas, (2001), *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)
- Renan, Ernest. (1990), “*What Is A Nation ?*” dalam *Nation and Narration*, Diedit oleh Homi Bhabha, (London: Routledge)
- Simbolon, Parakitri. T (2000), “*Indonesia Memasuki Milenium Ketiga*”, dalam *1000 Tahun Nusantara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara)
- Sindhunata, (2000), “*Demitologisasi Persatuan Nasional*” dalam *1000 Tahun Nusantara*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara)
- Soekarno, (1961), “*Pidato Bung Karno 1 Djuni 1945 (Lahirnya Pantja-Sila)*” dalam *Tudjuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, (Djakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi)
- Tjokrowinito, Moeljarto, (1998), “*Nasionalisme dalam Perspektif Politik*” dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press)
- Triardianto,Tweki. dan Suwardiman (2002), “*Potret Konflik di Indonesia*” dalam *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)